

20
20

Laporan Akhir Tahun

PKBI INKLUSIF DI TAHUN PANDEMI



PKBI PERKUMPULAN
KELUARGA
BERENCANA
INDONESIA

COPYRIGHT
2022



YOUTUBE
Suara PKBI

INSTAGRAM
@suaraPKBI

WEBSITE
www.pkbi.or.id

Penyusun Buku

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020 PKBI

Penerbit	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2022
Kontributor	: Ichsan Malik Eko Maryadi Heri Susanto Erry H. Kamka Yudi Supriadi Riska Carolina Leonora Evriani Liska Fauziah Devi Fitriyana Dwi Lestari Andi Iskandar Harun PKBI Jawa Barat PKBI Jawa Timur PKBI Kalteng PKBI Bali PKBI DI Yogyakarta D. Anisa Sunija Magdalena
Penyunting	: Eko Maryadi
Ilustrasi	: Liska Fauziah
Desain	: Ozora Design
Penerjemah	: Girivati
Hak Cipta	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Website	: www.pkbi.or.id
Email	: ippa@pkbi.or.id
Sekretariat	: Jl. Hang Jebat III No.F3, RT.4/RW.8, Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120

Daftar Isi

LAPORAN AKHIR TAHUN 2020 PKBI

Siapakah Kita	1
Kata Pengantar	3
Catatan Akhir Tahun 2020	5
Gambaran Umum Situasi Kesehatan Reproduksi di Tahun 2020	7
Kolaborasi PKBI-BKKBN Dalam Program Pembangunan Keluarga	8
Lokakarya Kawasan yang Aman Bagi Kelompok Waria	9
Batalkan RUU Ketahanan Keluarga, Sahkan RUU TPKS	11
Cross Learning Youth Center PKBI Jawa Timur	14
Dari Program Kespro, Remaja, Hingga Rumah Aman di PKBI Jawa Barat	15
Peran Humanitarian PKBI Dalam Banjir Bandang Masamba	17
Lomba Video Kreatif “Remaja dan Corona”	19
Ngobrol Asyik PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	20
Diskusi Talk More Social Inclusion PKBI Jawa Timur (Jatim)	21
KOLASE: Kolaborasi Aksi Remaja Sehat	22
Alamat PKBI Daerah	23
Struktur Organisasi Pusat	25
Laporan Auditor Independen	27

Siapakah Kita?

SEKILAS TENTANG PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan organisasi non pemerintah yang menjadi pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1957.

PKBI berkontribusi membangun jaringan penyuluh KB dan melatih tenaga medis/bidan untuk layanan kesehatan seksual reproduksi.

Sejak 1968, PKBI menginisiasi program penurunan angka kematian ibu dan pada 1970, program kespro PKBI diadopsi oleh pemerintah dengan mendirikan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Pada Maret 2020, PKBI menjalin kerja sama strategis nasional dengan BKKBN yang telah berubah menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diikuti kerja sama teknis seluruh PKBI Daerah dengan BKKBN Daerah.

Saat ini PKBI berfokus untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif melalui pelayanan klinik, edukasi, program kemandirian, program remaja, serta memberikan layanan bagi kelompok rentan.

Pada Desember 2022, PKBI berusia genap 65 tahun.

Ke depan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) akan terus hadir dan berjuang mewujudkan keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.



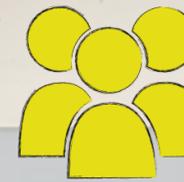
25 PKBI Daerah



186 PKBI Cabang



23 Klinik PKBI



599 Staff PKBI



4269 Relawan PKBI

Kata Pengantar

KETUA PENGURUS NASIONAL
DR. ICHSAN MALIK, MSI

Tahun 2020 PKBI berada di jalan yang terjal, tikungan curam dan tajam. Dimulai dengan problem asset Wisma PKBI yang rontok secara bisnis, berakhirnya semua program jangka panjang dari donor, dan 30 lebih relawan PKBI di berbagai daerah meninggal dunia terkait pandemi Covid19. Doa terbaik saya untuk relawan dan staf PKBI, semoga arwah dan spirit perjuangan mereka tetap melingkupi keluarga besar PKBI yang bertahan.

Pengurus Nasional harus memberikan arahan strategis. Kepada Direktur Eksekutif, kami meminta untuk melakukan konsolidasi staf dan relawan, efisiensi di semua tingkatan, juga perampingan personel. Sejumlah Tim dan pokja pun dibentuk untuk memberikan ruang manuver bagi perbaikan tata kelola di semua sektor.

Setelah memiliki Dana Cadangan Nasional, PKBI berhasil menyelesaikan utang gaji karyawan Wisma Hang Jebat (sejak 2018), berikut utang operasional lainnya sebesar 3,7 Miliar. Bukan itu saja, PKBI juga berhasil membeli asset baru berupa ruko tiga lantai di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur sebagai pengganti Wisma Kebon Kacang, yang terpaksa dijual, untuk menutupi defisit operasional.

Selanjutnya pada pertengahan 2020, PKBI terpilih oleh IPPF untuk menerima projek MA Governance Initiative. Di bawah panduan Tim IPPF Pusat di London, PKBI didorong untuk melakukan tinjauan (review) khususnya dalam tata kelola pemerintahan (governance) dan struktur kelembagaan PKBI.

PKBI juga melakukan perbaikan dan pengkinian pedoman mulai dari SOP Keuangan, SOP ketenagakerjaan, dan SOP kerelawanan, semuanya dikejar untuk memenuhi standar akreditasi IPPF.

Di tengah wabah Covid19 yang menggila sepanjang 2020, PKBI harus melakukan buka-tutup operasional termasuk pembatasan kerja, pemberlakuan WFH dan karantina bagi keluarga yang terpapar Covid.

Saat yang sama, beberapa calon donor mulai melirik kembali PKBI dan jajaran Eksekutif berhasil membangun proposal program strategis, yang harapannya, dapat memanjangkan nafas perjuangan PKBI dalam isu Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) dan Keluarga Berencana.

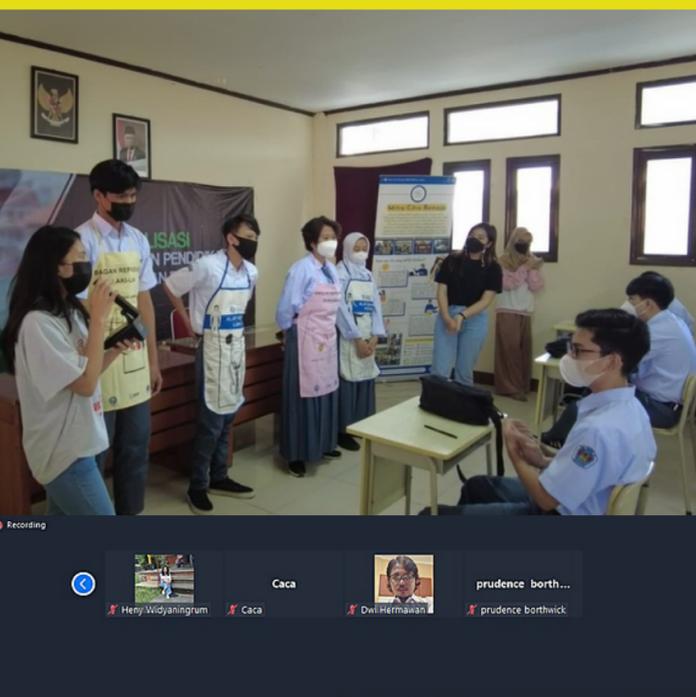
Menjelang akhir 2020, Pengurus Nasional menugaskan Tim Eksekutif untuk mempersiapkan Rapat Pleno dan Paripurna 2021 dan saya berharap PKBI bisa melewati badai pandemi Covid19 sebagai pemenang.

Ichsan Malik



Catatan Akhir Tahun 2020

EKO MARYADI
DIREKTUR EKSEKUTIF PKBI



2020 adalah tahun wabah, tahun yang sulit untuk kita semua.

Pandemi Covid 19 telah mengacaukan kehidupan warga di seluruh dunia, juga di Indonesia. Sejak pemerintah mengumumkan kasus positif Covid pertama pada Maret 2020, PKBI di daerah dan pusat menghadapi ujian yang bertubi-tubi.

Dampak langsung dari pandemi ialah ditutupnya Wisma PKBI pusat, dikarenakan tiadanya tamu atau klien yang menyewa kamar atau ruang pertemuan. Wisma PKBI pusat yang sepi, terus mengalami kerugian operasional sejak 2017, makin terpuruk secara finansial dengan adanya pandemi Covid19. Puncak krisis terjadi 2020 saat terjadi penundaan dan pemotongan gaji staf PKBI pusat karena harus ikut mensubsidi gaji karyawan Wisma dan minusnya kas keuangan PKBI pusat. Untuk menghentikan krisis keuangan, Pengurus Nasional PKBI membentuk Tim Asset Nasional untuk merancang skema penanganan asset dan krisis keuangan organisasi.

Terkait proyek, hampir semua proyek besar, meliputi RHRN, SST, Peduli, yang diterima PKBI sejak beberapa tahun sebelumnya, berakhir pada 2020. PKBI terpaksa mengakhiri kontrak kerja dengan staf proyek dan memotong tunjangan staf dan karyawan selama beberapa bulan sebagai bentuk efisiensi organisasi.

Era Pandemi Bekerja Secara Online

Wabah virus Corona atau SARS Cov-2 mengubah kondisi kerja, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik di dalam negeri. Di hampir semua propinsi, pemerintah pusat menerapkan pembatasan pergerakan sosial (PSBB dan PPKM) untuk menghentikan penularan virus Corona. Juga menyiapkan fasilitas medis untuk menangani puluhan ribu pasien Covid di berbagai daerah.

Sejalan dengan itu, PKBI berulang kali menerapkan sistem kerja secara online dari rumah (WFH) dan bekerja di kantor (WFO). Saat itu sekitar 75 persen program berpindah dari kegiatan offline ke online dan mengaktifkan forum-forum pertemuan melalui Zoom, Google Meet, dan Skype.

Setiap staf wajib mematuhi protokol kesehatan di kantor maupun di tempat umum, seperti memakai masker, menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengukur suhu badan harian, dan mengikuti skedul shifting WFO-WFH mingguan. Situasi ini berlangsung sepanjang 2020 sampai Mei 2021 saat Indonesia mengalami ledakan gelombang kedua Covid 19.

Masa-masa sulit PKBI ialah hampir setiap hari sepanjang 2020 mendengar kabar positif Covid atau meninggalnya relawan dan staf PKBI daerah. Tercatat 32 staf dan relawan PKBI yang dinyatakan positif Covid, sebagian besar sembuh, dan ada 24 relawan/staf PKBI meninggal dunia sejak April 2020 sampai Juli 2021.

Layanan Klinik PKBI di 16 Daerah dan 8 Cabang juga terpukul dengan adanya pandemi Covid 19. Hampir seluruh layanan Klinik PKBI seperti konseling, layanan kontrasepsi, IMS, HIV, Gynekologi, Obstetric, Urologi, Paediatric, dan CAC, mengalami penurunan drastis antara 72 sampai 95 persen. Beberapa klinik cabang bahkan terpaksa ditutup karena krisis operasional dan tenaga medis.

Dalam kondisi serba terbatas, PKBI harus menuntaskan proyek dan komitmen kepada donor, seperti Rutgers, Arrow, The Asia Foundation, dan Global Fund. Berkat komitmen dan kerja keras seluruh staf PKBI, pada April 2021, semua proyek berhasil di-closing dengan baik.

Di balik kesulitan, ada berkah dan kemudahan.

Dari program Remaja, Youth Forum PKBI sukses melakukan Kongres Online pertama pada Oktober 2020 dan memilih perwakilan Youth Forum Nasional yang baru dan memperkuat konektivitas Youth Center PKBI di berbagai daerah/propinsi.

Pada akhir 2020, Pengurus Nasional dan Tim Asset PKBI berhasil menjual Wisma Kebon Kacang, dan dengan itu PKBI menutup semua utang Perkumpulan, membayar pesangon (hak) seluruh karyawan Wisma selama beberapa tahun. PKBI juga bisa membeli gedung baru di Jakarta Timur dan menghasilkan dana abadi senilai 25 Miliar.

Memasuki tahun 2021 yang menantang, seluruh staf dan relawan PKBI di pusat dan daerah, terus memperkuat soliditas dan solidaritas, berkomunikasi dan membangun organisasi agar bisa bangkit dari keterpurukan. Upaya networking, komunikasi, dan advokasi terhadap isu-isu kekinian, mendapatkan respon positif dari mitra dan donor. Kerja sama dan kolaborasi PKBI dengan BKKBN meluas di 14 daerah.

Kerja keras dan kontribusi PKBI pun diterima luas oleh public dan pemerintah. Terlihat dari diterimanya penghargaan dari lembaga pemerintah seperti Bappenas, Kemendagri, Kemenkumham (Dirjen Pemasarakatan), Pemerintah Propinsi dan Daerah, atas kontribusi PKBI dalam program SDGs, pembinaan di Lapas Anak, pemberdayaan kelompok marjinal, dan penanganan bencana alam melalui program Humanitarian PKBI.

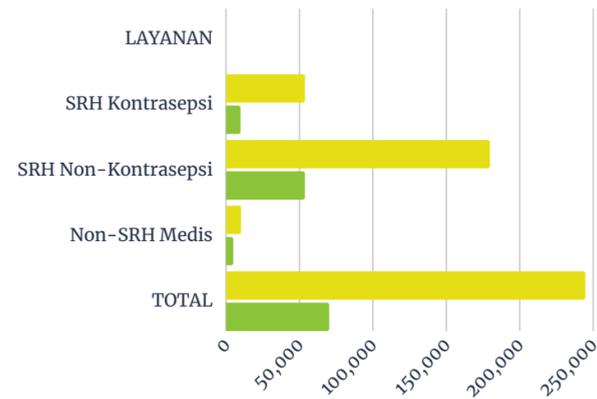
Saat pandemi Covid mereda, PKBI harus segera berlari mengejar berbagai ketinggalan. Skema proyek kerja sama penguatan klinik, program vaksinasi, layanan kesehatan sosial berwatak inklusif, terus dikembangkan dengan berbagai lembaga yang mempunyai visi-misi layanan kesehatan publik.

IPPF induk organisasi PKBI

Pada November 2019 Kongres IPPF di New Delhi yang dihadiri anggota Federasi dari 124 negara, Direktur Eksekutif PKBI menjadi saksi disepakatinya perubahan radikal IPPF dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi keuangan. Dengan motto "IPPF is changing for choice by choice", organisasi induk PKBI ini sepakat mereformasi diri menjadi Federasi Perencanaan Keluarga yang gesit, moderen, dan akuntabel.

Sebagai organisasi anak, PKBI akan mengikuti arus perubahan dan arahan dari IPPF, khususnya IPPF Regional (ESEAOR). PKBI juga berkomitmen untuk hadir memberikan layanan terbaik, khususnya dalam kesehatan seksual dan reproduksi, lebih luas, modern, dan akuntabel. Hidup Bukan Tentang Menunggu Badai Berlalu. Tapi Belajar Menari di Tengah Hujan.

Gambaran Umum Situasi Kesehatan Reproduksi di Tahun 2020



TURUNNYA LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pandemi Covid 19 sepanjang 2020 menyebabkan masyarakat takut untuk datang dan mengakses layanan di klinik. Tabel di bawah ini menunjukkan adanya penurunan jumlah layanan Kesehatan reproduksi di klinik PKBI sepanjang tahun 2020.

Layanan Sexual Reproductive Health (SRH) dan kontrasepsi seperti Pil KB, Kondom, IUD dan kontrasepsi lainnya, menurun hingga 82%. Layanan SRH Non-Kontrasepsi seperti layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV & AIDS, Ginekologi, Obstetrik, Fertilitas, Sexual & Gender Based Violence (SGBV), dan konseling psikologi menurun sebesar 70%. Adapun layanan medis non-SRH menurun sebesar 52%.

Menurunnya pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai klinik selama pandemi berdampak besar pada kesehatan perempuan dan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menemukan pada Maret 2021 bahwa 10% pengguna KB di 34 provinsi mengalami kesulitan mengakses alat kontrasepsi[1], menunjukkan dampak langsung pandemi pada layanan ini. BKKBN memperkirakan penurunan satu bulan penggunaan kontrasepsi di Indonesia dapat meningkatkan risiko kehamilan sebesar 15% [2].

Terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak dan perempuan membuat banyak pasien menderita. Salah satunya ialah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), pengerdilan anak (stunting), dan meningkatnya kematian bayi dan ibu. Dilaporkan juga oleh Komnas Perempuan, bahwa kekerasan berbasis gender meningkat tajam.

Sejak merebaknya COVID-19, data yang muncul dari laporan mereka yang berada di garis depan menunjukkan bahwa semua kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV), khususnya kekerasan dalam rumah tangga, semakin meningkat. Dipastikan ini adalah dampak langsung dari kebijakan stay at home dan online schooling untuk anak-anak usia sekolah.

UN Women mendefinisikan SGBV sebagai pandemi bayangan, yang harus ditangani secara kolektif dan global. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta mencatat 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pornografi online[3]. Dari sumber yang sama, pada Oktober 2020, SGBV telah meningkat sebesar 63 persen selama pandemi[4]. Meningkatnya angka pernikahan dini dan pernikahan paksa menunjukkan bahwa remaja perempuan sangat berisiko menjadi korban kekerasan[5].

Layanan kesehatan seksual dan reproduksi terutama bagi kelompok miskin dan rentan terabaikan. Jumlah pelayanan ODHA dan Populasi Kunci dalam program pencegahan HIV & AIDS di Indonesia menurun 50% sejak awal 2020. Inilah gambaran umum situasi kesehatan reproduksi pada 2020, yang harus ditangani oleh PKBI dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi PKBI-BKKBN dalam Program Pembangunan Keluarga

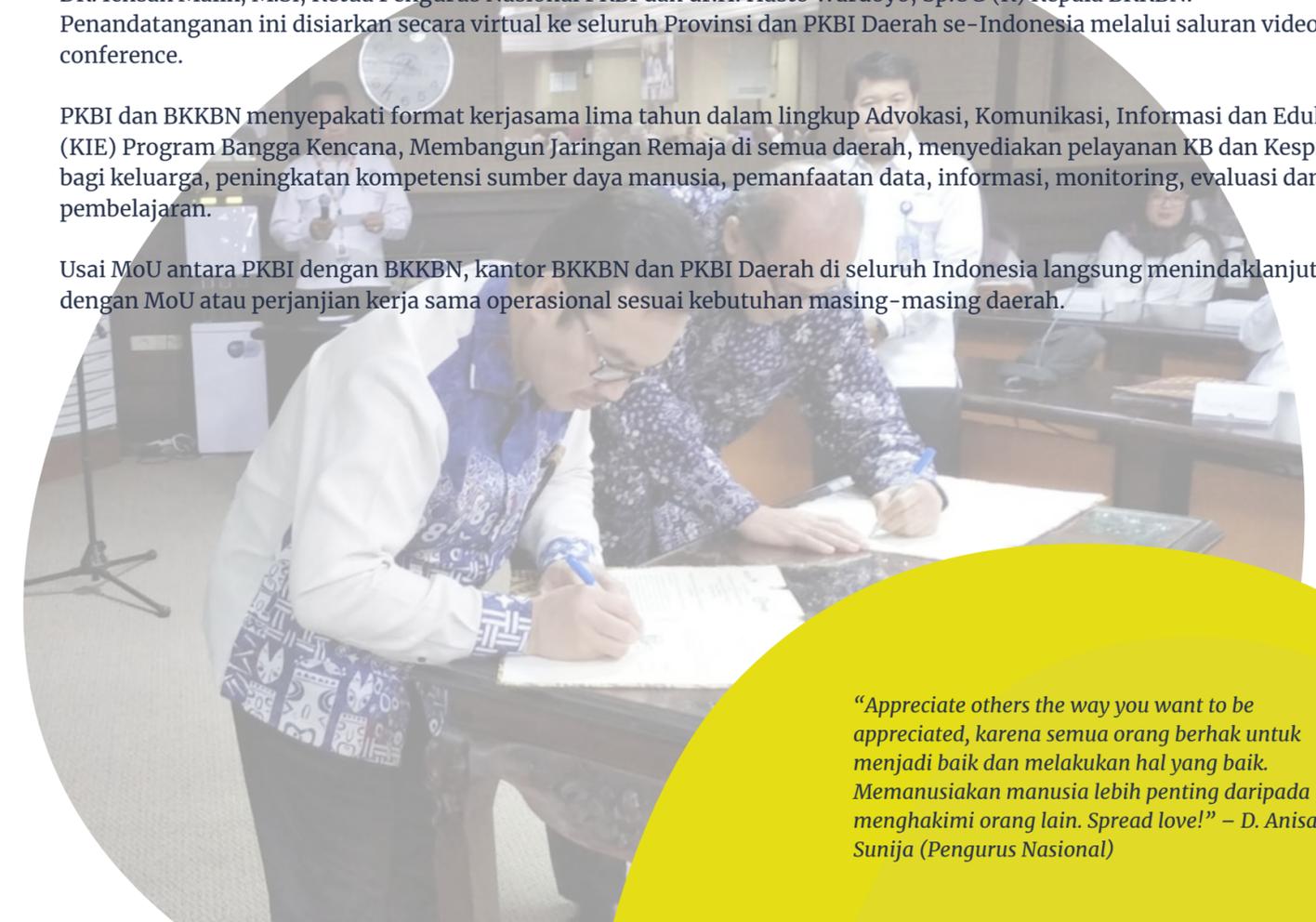
Mewujudkan keluarga bertanggung jawab, sejahtera dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, menjadi semangat Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) dengan memperhatikan aspek kesehatan fisik, mental dan sosial-spiritual.

Sejalan dengan PKBI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian memiliki tugas melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Pada 5 Maret 2020, PKBI melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan BKKBN dalam upaya membangun sinergitas program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Penandatanganan MoU dilakukan antara DR. Ichsan Malik, M.Si, Ketua Pengurus Nasional PKBI dan dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) Kepala BKKBN. Penandatanganan ini disiarkan secara virtual ke seluruh Provinsi dan PKBI Daerah se-Indonesia melalui saluran video conference.

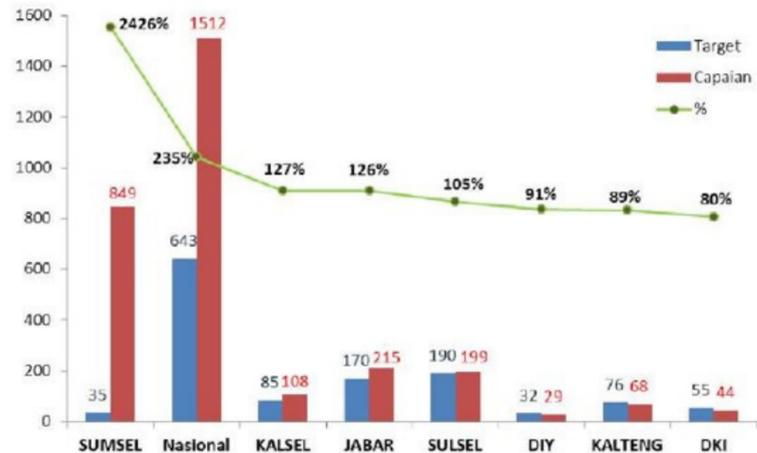
PKBI dan BKKBN menyepakati format kerjasama lima tahun dalam lingkup Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana, Membangun Jaringan Remaja di semua daerah, menyediakan pelayanan KB dan Kespro bagi keluarga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan data, informasi, monitoring, evaluasi dan pembelajaran.

Usai MoU antara PKBI dengan BKKBN, kantor BKKBN dan PKBI Daerah di seluruh Indonesia langsung menindaklanjutinya dengan MoU atau perjanjian kerja sama operasional sesuai kebutuhan masing-masing daerah.



“Appreciate others the way you want to be appreciated, karena semua orang berhak untuk menjadi baik dan melakukan hal yang baik. Memanusiakan manusia lebih penting daripada menghakimi orang lain. Spread love!” – D. Anisa Sunija (Pengurus Nasional)

Lokakarya Kawasan yang Aman Bagi Kelompok Waria



Berbagai komunitas waria yang terlibat dalam program Peduli (2017-2020), terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan sosial.

Secara keseluruhan penerimaan sosial terhadap Waria telah terjadi di masyarakat. Tidak adanya persekusi, diskriminasi, atau stigma buruk terhadap waria, membuat para Waria merasa nyaman dan terlindungi. Mereka berinteraksi dan menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana kekeluargaan dan relasi sosial yang sehat.

Data berikut ini menjelaskan bahwa secara nasional program Peduli (TAF-PKBI) berhasil mendorong partisipasi waria untuk aktif dan berkegiatan di tengah masyarakat.

Capaian nasional adalah 235% atau ada 1512 waria yang terlibat di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ada empat provinsi yang berhasil mencapai target di atas 100%, yaitu provinsi Sumsel, Kalsel, Jabar dan Sulsel.

Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan capaian tertinggi yaitu di atas 2000 persen, dengan keterlibatan waria mencapai 849 orang dari 35 yang ditargetkan. Ranking kedua adalah Propinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 127%, dari 85 waria yang ditargetkan terlibat, ternyata lebih dari 100 waria ikut kegiatan kemasyarakatan.

Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga dari prosentase pencapaian yaitu 126 persen. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mencapai di atas 100%, dengan melibatkan 199 waria dari 190 yang ditargetkan untuk mengikuti kegiatan di ruang publik. Sedangkan provinsi Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta, meskipun di bawah 100%, namun target pelibatan Waria mencapai di atas 80%.

Program ini dipastikan akan terus berjalan. Beberapa komunitas waria bahkan sudah meneken perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya tampak dari Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menetapkan "Desa Asri Mulya Trans 500 dan Desa Atu-atu adalah Desa Inklusi yang bisa menerima keberagaman".

Keberhasilan Program Peduli Pilar Waria dalam menciptakan perubahan signifikan pada domain kultural dan struktural terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Perubahan struktural kebijakan terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Satu per satu uraian perubahan per provinsi sebagai berikut :

IWAPA DI KALIMANTAN TENGAH

Di Kalimantan Tengah terdapat organisasi waria yang disebut IWAPA (Ikatan Waria Palangkaraya). Pada saat peringatan hari ulang tahun Palangkaraya diselenggarakan pawai budaya yang diikuti oleh IWAPA. Kehadiran IWAPA di dalam pawai budaya tersebut menunjukkan bahwa komunitas waria diterima sebagai bagian dari masyarakat dan terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kondisi tersebut patut dihargai dan membuktikan bahwa ada sikap penerimaan publik yang semula tidak mengakui keberadaan waria. Namun setelah ada program Peduli, kerja sama PKBI dan The Asia Foundation, makin banyak pilar waria yang mendorong komunitasnya untuk tampil di depan publik. Saat itulah terjadi akulturasi dan penerimaan budaya oleh pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran Waria. Semoga kawasan yang aman bagi Waria semakin banyak. Perlahan dan pasti, stigma dan diskriminasi terhadap waria dalam masyarakat, akan berkurang dan hilang.

Perubahan struktur dan legalitas

IWAPA sebagai payung organisasi waria di Palangkaraya pun mengalami perubahan signifikan setelah Program Peduli Pilar Waria dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Diantaranya berupa pembenahan struktur kepengurusan dan bahkan mendapat ruangan Sekretariat di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalteng. Selain itu IWAPA secara resmi terdaftar sebagai ormas sesuai UU No.17 tahun 2013. Sejak itu organisasi waria tidak bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali oleh keputusan pengadilan dan anggota organisasi bersepakat untuk membubarkan diri. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan struktural dari sekadar organisasi komunitas untuk tempat berkumpul dan bertemu waria, sekarang IWAPA berkedudukan sejajar dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.

IWALATA DI KALIMANTAN SELATAN

Selain IWAPA ada juga IWALATA, singkatan dari Ikatan Waria Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejak terlibat dalam kegiatan Tanah Laut Gowes Cross Country (GCC) tahun 2019, IWALATA mengalami perubahan signifikan. GCC merupakan kegiatan tahunan Pemkab Tanah Laut yang semula hanya diikuti oleh warga biasa non Waria. Namun sejak IWALATA mengadakan kegiatan bersama warga seperti senam zumba dan olahraga volley, akhirnya panitia gowes mengundang IWALATA untuk terlibat di dalam kepanitiaan kegiatan tersebut.

Peserta gowes yang hadir mencapai lima ribu orang lebih. Banyak warga terkagum-kagum melihat komunitas Waria bisa terlibat aktif dalam kegiatan yang melibatkan peserta dari provinsi luar Kalimantan. Keterlibatan Waria dalam kegiatan publik yang berskala besar di Tanah Laut Kalimantan Selatan, menunjukkan keberadaan komunitas waria di Kalimantan Selatan sudah diakui publik dan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi serta persekusi yang biasanya dialami oleh waria.

Penerimaan warga dan pemerintah terhadap keberadaan organisasi waria diikuti dengan perubahan struktural. Diantaranya, IWALATA berhasil memperoleh ijin usaha yang dimiliki oleh anggota IWALATA, berupa pemasangan reklame usaha Salon Tiara. Persyaratan ijin usaha tersebut mendapatkan dispensasi dan kemudahan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sehingga salon tersebut beroperasi seperti usaha formal lainnya.

Batalkan RUU Ketahanan Keluarga, Sahkan RUU TPKS

Beredarnya Draft RUU Ketahanan Keluarga, tanggal 7 Februari 2020 telah memicu perdebatan masyarakat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ikut mencermati RUU Ketahanan Keluarga dan menilai substansi RUU tersebut problematik dan tidak mencerminkan azas kesetaraan maupun azas non-diskriminasi.

KONSEP KELUARGA KONSERVATIF

RUU Ketahanan Keluarga memperkenalkan model atau sistem keluarga biner yang konservatif, yakni pembagian peran dalam keluarga secara tegas dan ajeg. Misalnya peran istri wajib sebagai pengurus rumah tangga.

Konsep dan definisi "keluarga" secara normatif, sah saja. Namun, membuat standarisasi apa konsep keluarga yang baik dan benar? sesuai peran anggota berdasarkan gender, itu persoalan. Negara tidak berhak mendiktekan konsep keluarga yang bias gender, hanya mengacu pada nilai keyakinan tertentu dan tidak memberi ruang perbedaan atau ekspresi personal. Menurut teori, sistem Keluarga Bowen menyebutkan bahwa tiap unit dalam keluarga punya perasaan emosionalnya masing-masing.

Dengan demikian, memaksakan tiap unit untuk interdependensi dengan yang lain walaupun mempromosikan keluarga yang harmoni dan kooperatif, juga bisa memicu masalah dan ketegangan dalam keluarga.

Keluarga bukanlah konsep statis dan harus terstandarisasi dengan membenarkan teori satu pihak (RUU Ketahanan Keluarga) dengan menelantarkan pemikiran lainnya. Tidak boleh Undang Undang dibangun atas konsep merendahkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, kemampuan anak bertanggung jawab atas keputusannya, ataupun mengatur terlalu teknis relasi suami istri.

KONSEP KELUARGA ALA PKBI

Sudah lebih dari lima dasawarsa PKBI mengenalkan konsep Keluarga bertanggung jawab yang mengedepankan lima dimensi utama yaitu:

- 1) Dimensi kelahiran, artinya setiap kelahiran itu diharapkan dan merupakan tindakan sadar dan harus direncanakan. Inilah titik awal konsep Keluarga Berencana.
- 2) Dimensi kesehatan, sikap dan perilaku untuk hidup sehat penting untuk dipromosikan dan diimplementasikan dalam keluarga.
- 3) Dimensi pendidikan, artinya bahwa anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga tidak boleh dibedakan pendidikannya, semua harus diterapkan setara dan dialogis.
- 4) Dimensi kesejahteraan, yaitu mengutamakan martabat keluarga (being) bukan sekadar memiliki kekayaan (having). Tidak ada artinya kaya tetapi tidak punya martabat.
- 5) Dimensi masa depan, seluruh keluarga harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, harus dihindarkan keluarga-keluarga yang terperangkap kepada nilai-nilai yang tidak relevan atau konservatif.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga, tidak disebutkan "kesetaraan" sebagai indikator untuk mempertahankan keluarga. Ini membuat sekat-sekat peran anggota keluarga yang tidak lagi cair. Keluarga menjadi susunan manusia berkasta seperti rakyat kepada raja. RUU ini tidak memerdekakan melainkan membelenggu anggota keluarga.

SEHAT JIWA BUKAN PENYIMPANGAN

Isu lain dalam RUU Ketahanan Keluarga ialah keragaman identitas gender dan orientasi seksual yang tidak mainstream seperti LGBT dianggap sebagai ancaman non-fisik? (draft pasal 50 RUU KK). RUU ini juga memasukkan homoseksual sebagai penyimpangan seksual. Dua hal ini jika diakomodir dalam RUU Ketahanan Negara maka akan membenarkan upaya persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk memberangus hak-hak LGBT sebagai minoritas di Indonesia.

RUU Ketahanan Keluarga menyimpulkan bahwa Sadisme, Masochisme, Homoseksual berasal dari rumpun yang sama, yaitu penyimpangan seksual. Perumus RUU Ketahanan Keluarga mencampuradukkan antara kekerasan seksual, dengan hubungan intim yang aman dan dilakukan dengan persetujuan (akal-emosional) para pihak.

Perumus dan pengusul RUU Ketahanan Keluarga telah menghilangkan aspek keilmuan dalam menelaah keragaman gender dan seksualitas. Pedoman internasional yang diakui secara global pun dicampakkan. Yang tampak justru upaya negara menerabas batas-batas privasi rumah tangga melalui aturan ke ruang-ruang privasi warga.

NORMA AGAMA DAN ETIKA SOSIAL

Frasa yang kerap muncul dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah pentingnya mengedepankan norma agama dan etika sosial. Saat yang sama, RUU ini mengabaikan hak kesetaraan dan bebas dari diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya. Padahal hak kesetaraan dan kespro ini termasuk 10 Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang diakui masyarakat internasional dan PBB. Konsep hak yang dimuat dalam RUU KK hanya sebatas HAM dasar seperti hak hidup dan hak layanan dasar, selanjutnya menjadi "robot" keluarga.

Perjuangan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) telah diadopsi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah Indonesia, khususnya tujuan ketiga dan tujuan kelima, kesehatan dan kesetaraan gender. Artinya dengan mengabaikan HKSR, RUU Ketahanan Keluarga akan menghambat capaian RPJMN. Bappenas sebagai badan yang bertanggung jawab atas capaian SDGs harus melihat RUU KK sebagai kerikil tajam yang harus disingkirkan.

Selain itu, norma agama dan etika sosial atau lebih tepatnya kepantasan dalam masyarakat, tidak sepatutnya dibenturkan. Secara konteks, agama seharusnya berada pada tatanan ruang-ruang pemikiran, panduan jiwa dan juga nilai hidup seseorang. Sedangkan etika dan kepatutan, berada dalam ranah sosial masyarakat. Artinya norma agama seharusnya menjadi pelengkap satu sama lain. Bukannya diadu seperti pemilihan umum atau konstestasi politik.

Batalkan RUU Ketahanan Keluarga, Sahkan RUU TPKS

PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN PSEUDOSCIENCE

Dalam pasal 85 RUU KK disebutkan adanya Badan yang menangani krisis karena penyimpangan seksual, ini justru melemahkan ataupun mengubah kerja Direktorat Ketahanan Keluarga di bawah BKKBN. Penambahan Badan baru ini overlapping dengan kerja-kerja BKKBN dan Kementerian lain terkait, dan menambah beban negara untuk mengurus privasi warga negara tidak perlu diatur.

Munculnya pasal dan badan yang mengurus penyimpangan seksual akan mengundang oknum-oknum kesehatan alternatif atau dokter-dukun (pseudoscience) yang tidak punya kompetensi dalam rehabilitasi. Belum lagi pasal 90 ayat (1) RUU KK, yang akan menguatkan persekusi dan kekerasan kepada kelompok minoritas dalam keluarga ataupun komunitas.

Konsep rehabilitasi sosial di dalam RUU KK bermasalah karena tidak mengacu pada kaidah ilmiah dan pengalaman riil. Upaya rehabilitasi sosial haruslah disertai bukti-bukti valid dengan tetap menelaah dampak lanjutan dari penanganan sebelumnya.

“Terima kasih PKBI, untuk menjadi wadah bagi kami remaja berkarya dan berdaya.”
– Magdalena (Ketua Youth Forum)

PEMBOROSAN ANGGARAN DAN MUBAZIR

RUU KK terbaca memboroskan anggaran negara karena bersifat mengulang (redundant) beberapa aturan/UU yang ada.

Misalnya mengulang aturan tentang peran masyarakat dalam keluarga, itu sudah diatur dalam UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK)

Kemudian upaya kehamilan di luar cara alamiah, sudah diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Juga pasal tentang rehabilitasi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sudah diatur dalam UU Kesehatan Jiwa Nomor No. 18 tahun 2014. UU Kesehatan Jiwa terbukti mengedepankan HAM dengan azas non-diskriminatif karena memberikan rehabilitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan bukan kepada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Terkait pasal perkawinan dan hubungan suami istri dalam RUU KK, terlalu timpang pada satu agama dan mengulangi aturan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. RUU KK bahkan bermasalah dalam isu pengangkatan anak (adopsi) yang mengabaikan PP Nomor 54 tahun 2007. Bahkan lebih parah pasal RUU KK ini menghapus aspek pidana penelantaran anak yang sudah diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan anak.

Akhirnya Tim Advokasi PKBI menyimpulkan : RUU Ketahanan Keluarga ini problematik dimana banyak substansinya mengulang ketentuan yang sudah ada. Catatan lainnya, RUU KK ini tidak hanya mmenghamburkan anggaran negara tapi juga berpotensi memicu sistem keluarga Indonesia yang diskriminatif dan bias gender.

Cross Learning Youth Center PKBI Jawa Timur

Program ini merupakan hasil diskusi para remaja PKBI dalam rangka beradaptasi menghadapi pandemi COVID 19 di awal 2020. Kegiatan-kegiatan tatap muka yang sudah disusun dalam rencana kerja tahun harus dihentikan karena pandemi. Sehingga teman-teman remaja memutuskan untuk sesi berbagi melalui zoom meeting dengan tema: Cross Learning Youth Center (CLYC).

CLYC dilaksanakan sejak dari bulan Agustus 2020. CLYC merupakan sesi berbagi antar Youth Forum PKBI daerah yang kegiatannya bisa menginspirasi kawan-kawan remaja lainnya. PKBI memiliki 25 komunitas Youth Forum yang tersebar diseluruh kota di Indonesia.

Salah satu CLYC yang menarik yaitu berbagi pengalaman/aktifitas dan ke-khasan komunitasnya oleh Youth Forum dari Jawa Timur. Para remaja disana sudah membangun ekonomi kreatif sejak beberapa tahun lalu. Mereka membuat dan mengelola café di kantor PKBI Jawa Timur tepatnya di Surabaya. Café tersebut di dukung dengan Wifi gratis dan tempat pertemuan yang kondusif, sehingga Café ini bisa digunakan oleh siapapun yang ingin mengadakan pertemuan rapat ataupun kegiatan semacam diskusi.

Tak lupa para remaja melakukan kegiatan promosi ke komunitas sekitarnya agar bisa dijangkau oleh siapapun yang membutuhkan. Bahkan disana ibu-ibu kader PKK sering melakukan pertemuan di café tersebut atupun mitra/jaringan mereka dari daerah lain pun selalu mampir di café tersebut.

Model bisnis yang dikembangkan Youth PKBI Jawa Timur ini bukan sekedar mengasah kemampuan remaja dalam dunia bisnis saja. Lebih jauh mereka sudah memikirkan bagaimana mendapatkan sumber dana untuk membiayai program-program Youth Forum PKBI Jatim. Untuk membangun usaha semacam ini tentunya para remaja tidak sendirian. Mereka sangat dibantu oleh PKBI Daerah Jatim dalam permodalan juga asistensi pengembangan bisnisnya. Sukses terus Youth Forum PKBI Jawa Timur!



→ 13

→ 13 A

FILM NEGATIVE



→ 14

→ 14 A

FILM NEGATIVE

FILM NEGATIVE

Dari Program Kespro, Remaja, hingga Rumah Aman di PKBI Jawa Barat

Munculnya kebutuhan layanan kesehatan reproduksi di masa pandemi bagi kelompok perempuan rentan, telah menginisiasi PKBI Jawa Barat.

Mulai pertengahan 2020, PKBI bermitra dengan IPPF mengimplementasikan Program SPRINT melalui Proyek Covid-19 Emergency Fund. Tujuannya untuk merespon kebutuhan layanan kesehatan reproduksi di masa pandemi, terutama bagi kelompok rentan perempuan. PKBI Daerah Jawa Barat menjadi salah satu lokasi fokus program dan terus mengembangkan layanan komprehensif dan terintegrasi mulai dari layanan kesehatan, psikologi, penyediaan rumah aman sementara, serta pendampingan reintegrasi bagi kelompok perempuan rentan. Yang dimaksud terakhir ini adalah pendampingan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Bekerja dalam situasi pandemi tentu memiliki tantangan tersendiri. Merujuk hasil rekapitulasi capaian target klien dan layanan Klinik Teratai Jawa Barat di akhir program yaitu per 15 Maret 2021, dari total target klien yang disepakati di work-plan berjumlah 1.147 klien tercapai di akhir program sekitar 1.004 klien dengan tingkat capaian 87,53 %.

Strategi umum Program Indonesia Respon Covid-19 periode September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, di PKBI Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

Penerapan Protokol Pencegahan Covid-19 bagi Internal Team melalui pengadaan kelengkapan APD yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh staf pelaksana dan relawan PKBI Jawa Barat yang masih bekerja di tengah pandemi.

Peningkatan Pemahaman terkait Isu dan Kasus Kekerasan Berbasis Gender bagi Staf Pelaksana Program serta SDM Pendukung di Internal PKBI Jabar dan menjadi provider layanan Kesehatan yang kompensif dan terintegrasi terutama untuk melayani kelompok sasaran khusus seperti korban kekerasan berbasis gender diperlukan pemahaman yang mendalam serta sensitive isu yang berspektif korban.

Peningkatan Kapasitas Youth Konselor

Bertujuan untuk memperkuat layanan di Klinik Teratai dalam mengembangkan cakupan target sasaran khususnya bagi kelompok muda, dengan mengembangkan skema dan kurikulum training yang bervariasi sebagai berikut;

Sesi 1, penguatan kapasitas youth volunteers dilaksanakan 2 hari yaitu 27 Januari 2021 dengan materi How to be conselor. Tanggal 28 Januari 2021 dengan materi Praktek Konseling dengan bimbingan narasumber Gusriyeni Yarman seorang tenaga psikolog di Klinik Teratai. Kegiatan ini diikuti 10 youth volunteers Mitra Citra Remaja PKBI Jawa Barat.

Sesi 2, dilaksanakan tanggal 29 Januari 2021, sebanyak 10 orang peserta yang telah mengikuti sesi ke-1 dibekali wawasan serta keterampilan berupa Pengenalan Sistem CMIS dan Praktek Input Data hasil konseling ke dalam sistem recording-reporting eIMS PKBI. Kegiatan ini dipandu oleh Uung Sobarna sebagai entry data officer di Klinik Teratai PKBI Jawa Barat.

Sesi 3, kegiatan berupa Praktek Magang Youth Konselor selama 1 (satu) bulan di Klinik Teratai yaitu bulan Februari 2021. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pembagian piket konseling harian di Klinik Teratai PKBI Jawa Barat

Penyusunan Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender, mengimplementasikan sebuah program memerlukan dukungan instrumen manajemen program yang memadai. Salah satu instrumen penting dalam merealisasikan program yaitu buku panduan yang akan menjadi rujukan bagi setiap pelaksana program.

Penerbitan Buku Panduan ber-ISBN

Melalui berbagai proses dan tahapan, akhirnya Buku Panduan Penanganan Berbasis Gender ini telah masuk proses cetak dan segera diterbitkan dalam 2 (dua) edisi yaitu edisi cetak dan e-Book. Direncanakan akan didistribusikan secara nasional kepada PKBI Daerah lain yang memiliki klinik serta jaringan mitra kerja PKBI Jawa Barat yang telah menjadi mitra layanan rujukan baik itu jaringan LSM, organisasi komunitas maupun pemerintah. Buku panduan ini telah terdaftar resmi dalam katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan ISBN bernomor 0321001.

Diseminasi Buku Panduan

Pada Rabu, 10 Maret 2021 telah dilaksanakan kegiatan diseminasi nasional buku panduan penanganan kekerasan berbasis gender yang bertujuan untuk mengenalkan buku panduan kepada PKBI Daerah lain di Indonesia, termasuk menggali pengalaman daerah lain serta umpan balik untuk proses penyempurnaan.

Transit Home bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

PKBI Jawa Barat ingin memberikan dukungan yang memadai dalam penanganan korban KBG modeling nasional. Melalui dukungan program Covid-19 Emergency Funds IPPF, PKBI Jabar telah memberikan dukungan untuk pengadaan fasilitas Transit Home (Rumah Aman Sementara) bagi perempuan korban KBG. Sampai dengan periode akhir program, proses renovasi dan setup Transit Home sudah selesai sesuai rencana.

Peran Humanitarian PKBI dalam Banjir Bandang Masamba

Banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, telah menimbulkan krisis kesehatan dan krisis air bagi ribuan kepala keluarga.

Musibah banjir di Masamba, Senin (13/7/2020) pukul 19.00 WITA dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya 3 sungai besar yaitu Sungai Rongkong, Sungai Meli dan Sungai Masamba. Enam kecamatan tak mampu meredam luapan sungai dengan dampak terparah yaitu Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat.

Banjir bandang ini berdampak kepada 4.930 KK yang menempati 14 lokasi pengungsian yang tersebar di 6 Kecamatan. Dilaporkan 15 korban jiwa dan 46 warga masih dalam pencarian. Banjir bandang menyebabkan sejumlah rumah hanyut terbawa air, puluhan rumah roboh, ratusan rumah tertimbun sedimen lumpur, dan jalanan tertutup lumpur antara satu hingga dua meter.

Krisis kesehatan dimana jumlah Partus di pengungsian 20 kasus, 303 penyintas dalam kondisi hamil serta 162 ibu menyusui. Dalam kondisi darurat dibutuhkan bantuan dengan prioritas seperti obat-obatan, makanan siap saji, selimut/pakaian layak pakai, Tenda/Terpal/ Peralatan memasak, beras dan lauk-pauk serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan balita, disabilitas, remaja putri, serta lansia.

Program Humanitarian PKBI menurunkan team dari Regional Tengah untuk melakukan kajian cepat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif PKBI Sulawesi Selatan bersama 5 staf. Berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan selama 5 hari, di Kecamatan Baebunta tercatat bahwa ada 832 Jiwa yang terdampak, dimana kelompok rentan terdampak meliputi lanjut usia 205 orang, difabel 4 orang, dan 24 Ibu Hamil.

Langkanya Air Bersih dan Air Minum

Ketersediaan Air Bersih dan Air minum warga pasca bencana banjir, masih terganggu disebabkan kondisi PDAM mengalami kerusakan pada pipa distribusi ke warga. Kondisi itu diperparah dengan ketersediaan Air baku yang mengalami kekeruhan dan endapan lumpur di bak-bak penampungan PDAM. Sebagian warga di Masamba akhirnya mengandalkan air baku dari sumur gali dan air tanah yang jauh dari persyaratan layak air baku.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh warga penyintas di pengungsian (Meli, Radda dan Baebunta) yang mengandalkan Air bersih dan Air minum dari PMI dan Pamadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Masamba. Sekitar 16 truk air bersih dikerahkan oleh PMI Propinsi Sulsel, PMI Makassar, Damkar Makassar, serta PMI dan Damkar Masamba. Belakangan truk pengangkut air bersih yang beroperasi tinggal empat unit, dua milik PMI Masamba dan dua lainnya milik Damkar Masamba, untuk memenuhi kebutuhan 12 titik pengungsian yang masih dihuni oleh penyintas. (sumber: PUPR Kab.Masamba).

Kondisi Sanitasi

Kondisi sanitasi pasca bencana juga mengalami kerusakan. Banyak sampah dari sisa makanan dan plastik menumpuk di beberapa titik pengungsian. Lokasi pengungsian yang tandus karena merupakan lahan bekas perkebunan kelapa sawit. Kondisi Masamba yang sering hujan, mengakibatkan sampah yang menumpuk menjadi bau busuk yang bisa menimbulkan penyakit. Kondisi sanitasi tersebut sangat rentan bagi Perempuan Hamil, Bayi dan Balita serta lansia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Masamba, penyakit-penyakit akibat sanitasi yang buruk sudah terlihat sejak beberapa minggu pasca bencana banjir bandang terjadi.

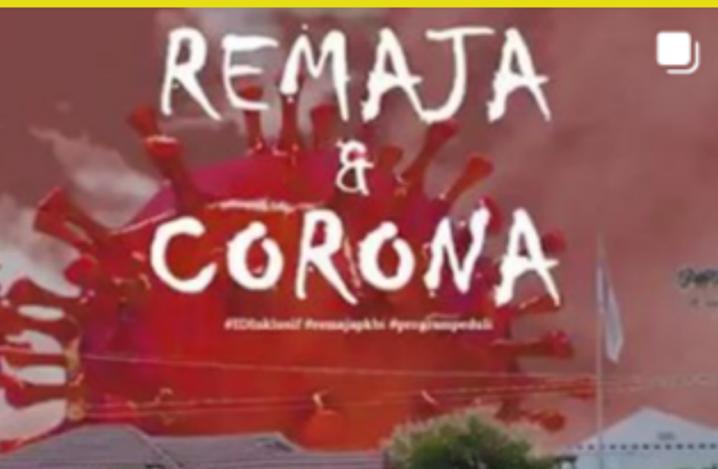
Kondisi bencana banjir bandang mengakibatkan ketimpangan gender, diskriminasi bagi disabilitas. Misalnya dominasi laki-laki terhadap pembagian bantuan sosial termasuk keputusan-keputusan dalam keluarga dan fasilitas yang tidak berpihak kepada kelompok perempuan.

Kelompok Disabilitas yang jumlahnya juga cukup banyak (lihat data Rapid Assesment JMK), sering mengalami diskriminasi karena tidak dapat mengakses bantuan. Belum lagi akses ke fasilitas dan sarana sanitasi sulit dijangkau karena tidak ramah disabilitas. PKBI Sulsel yang bekerja selama respon bencana banjir di Masamba harus bekerja keras menjaga suasana kesetaraan dan inklusivitas.



"Doa terbaik dipanjatkan untuk relawan dan staf PKBI yang meninggal selama pandemi Covid19. Semoga spirit perjuangan mereka tetap hidup di tengah keluarga besar PKBI yang bertahan" - Ichsana Malik (Ketua Pengurus Nasional PKBI)

Lomba Video Kreatif “Remaja dan Corona” Hari Remaja Internasional 2020 PKBI Kalimantan Tengah (Kalteng)



MAKA JALANILAH KEHIDUPAN
KALIAN DENGAN BAIK

Peran Remaja Pada Masa Pandemi



Hari Remaja Internasional diperingati setiap 12 Agustus, termasuk di Indonesia. Tahun ini PBB mengangkat tema “Youth Engagement for Global Action” yang berfokus pada cara-cara di mana keterlibatan kaum muda dan kemampuan menyoroti permasalahan di tingkat global. PKBI mengajak orang muda untuk meningkatkan melihat kehadiran dan keterlibatan dalam berbagai aksi sosial secara signifikan.

Di Kalimantan Tengah, peringatan International Youth Day 2020 diselenggarakan oleh PKBI Kalteng berkolaborasi dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya. Mulai 1 – 28 Agustus 2020 PKBI dan Polkes menggelar lomba pembuatan Video Keatif remaja bertema “Remaja dan Corona” dengan sub tema : 1) Edukasi Corona, 2) Peran Remaja pada Masa Pandemi Covid-19, dan 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Remaja. Agenda kegiatan dimulai dari pendaftaran dan upload video pada 1 – 27 Agustus 2020, diikuti penjurian pada 28 –29 Agustus 2020 .

Untuk penjurian video kreatif dilakukan oleh internal PKBI, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya, Jurnalis, dan Pengamat Videografi. Publikasi pengumuman lomba melalui instagram official PKBI Kalimantan Tengah, Youth Center SIAR, dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya [1]. Lomba ini diikuti oleh 18 (delapan belas) partisipan dari dalam dan luar wilayah Kalimantan Tengah.

Pengumuman pemenang lomba video kreatif remaja dilakukan pada 31 Agustus 2020 pada kegiatan Webinar “Remaja Bicara Corona” yang juga diselenggarakan PKBI bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya. Kategori pemenang lomba video kreatif adalah 3 (tiga) besar The Best Video dan 1 (satu) Most Viewers Video. Juara 1 The Best Video oleh Muhammad Alfi Alfaris[2], Juara 2 The Best Video oleh AR Team[3], Juara 3 The Best Video oleh JK Project[4], dan Most Viewers Video oleh Ravriel Naswan Saddam Putera Kusbianto.

Selamat untuk para pemenang lomba video kreatif. Jangan lupa meng-upload di Youtube dan medsos PKBI.

Ngobrol Asyik PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) "Proyeksi Ketersediaan Pangan di DIY Menjelang Lebaran"

Kegiatan Ngobrol Asyik ini adalah salah satu bentuk adaptasi PKBI DIY saat menghadapi pandemi COVID19. Ngobrol Asyik hadir karena pemerintah memberlakukan PSBB namun luput untuk memenuhi kebutuhan pangan warga di masa pandemi.

Padahal menurut pasal 52 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan yang sesuai dengan Karantina Rumah. Ketidakmampuan Negara dalam memikirkan kebutuhan pangan rakyatnya inilah yang membuat masyarakat sipil di DIY seperti Solidaritas Pangan Jogja, Jaringan Lumbung Pangan Jogja (JALU), dan lainnya membuat solidaritas yang fokus pada kebutuhan pangan.

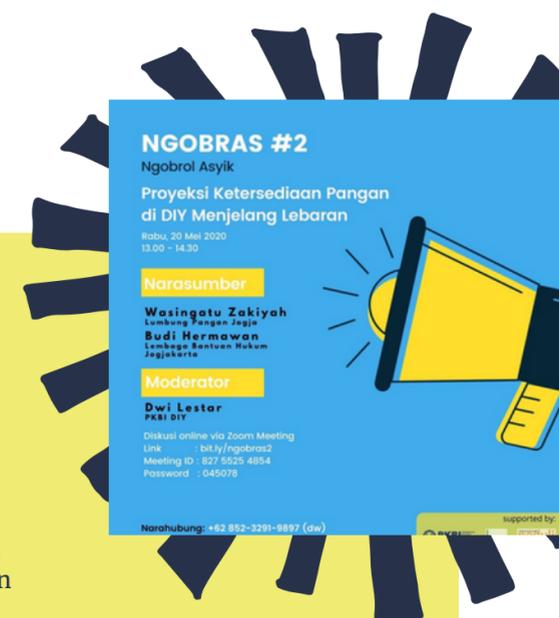
Aktivitas solidaritas warga ini makin sigap saat menjelang lebaran. Karena umumnya di Indonesia saat menjelang lebaran, harga pangan akan naik dan sulit terjangkau warga.

PKBI DIY yang menjadi anggota Solidaritas Pangan DIY menyampaikan bahwa dalam pembagian pangan/bantuan sosial ini perlu sekali menyasar kawan-kawan waria serta pekerja seks. Sebagai kelompok minoritas, mereka sulit mengakses bantuan sosial dari pemerintah, karena kendala administrasi "tidak punya KTP". Mereka tidak bisa bekerja di ranah formal. Sehingga kelompok ini rentan mengalami kemiskinan secara struktural, dan selalu luput dari program bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam forum tersebut, teman-teman solidaritas pangan di DIY menyatakan akan memberikan bantuan dari pemerintah DIY kepada kelompok tersebut. Kemudian juga akan melakukan advokasi kepada pemerintah agar mereka mendapatkan KTP sebagai hak warga negara, juga diprioritaskan dalam pembagian bansos.

Perbincangan ini memunculkan strategi-strategi baru dalam menangani masalah keterbatasan pangan di kalangan kelompok minoritas. Misalnya mereka dianjurkan bercocok tanam di sekitar rumah atau kos bahkan lahan kosong sekitarnya. Dengan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk menanam dan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Sederhana menanam sayuran yang biasa di konsumsi sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk pangan.

Kemudian mereka disarankan untuk memanfaatkan usaha yang dimiliki, untuk dikembangkan melalui teknologi finansial kekinian. Dengan proses-proses seperti itu, harapannya teman-teman waria dan perempuan pekerja seks yang ikut dalam forum ini tetap optimis, bahwa masih ada harapan bertahan hidup di masa pandemi yang sulit ini.



NGOBRAS #2

Ngobrol Asyik
Proyeksi Ketersediaan Pangan
di DIY Menjelang Lebaran

Rabu, 20 Mei 2020
13.00 - 14.30

Narasumber

Wasingatu Zakiyah
Lumbung Pangan Jogja
Budi Hermawan
Lembaga Bantuan Hukum
Jogjakarta

Moderator

Dwi Lestar
PKBI DIY

Diskusikan online via Zoom Meeting
Link : bit.ly/ngobras2
Meeting ID : 927 5526 4954
Password : 045078

Narahubung: +62 852-3291-9897 (wa)

supported by

Diskusi Talk More Social Inclusion PKBI Jawa Timur (Jatim)

Mewujudkan Kemerdekaan dan Inklusi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

Diskusi tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diwujudkan dalam kegiatan webinar bertajuk “Talk More Social Inclusion” dengan tema Mewujudkan Kemerdekaan dan Inklusi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum.

Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2020, dihadiri oleh Drs. Herawanto Ananda, M.Si (DP3AK Provinsi Jawa Timur), Andik Ariawan A.Md.IP., S.H., M.H. (Kasi Pembinaan LPKA Kelas I Blitar), Abdul Salim Siregar (Direktur Eksekutif PKBI Daerah Bengkulu), dan Tri Wahyu Ariningsih (Direktur PKBI Cabang Gunungkidul), dengan Abdi Suryaningati (Team Leader Program Peduli The Asia Foundation) sebagai keynote speaker dan Humam Maulana (Anggota Youth Center SeBAYA PKBI Jatim) sebagai moderator.

Dengan hadirnya narasumber dari berbagai lembaga, banyak bermunculan perspektif mengenai perlindungan anak, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban pidana, anak yang maupun saksi tindak pidana.

Menurut Abdi Suryaningati dalam sambutannya, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu dari enam pihak yang harus mendapatkan inklusivitas di Indonesia. Sehingga penting untuk membantu mereka dapat terpenuhi hak-haknya dan dapat setara dengan anak yang lain. Selanjutnya, Abdi berharap program webinar Talk More Social Inclusion ini dapat berlanjut dengan adanya tindak lanjut nyata dalam mewujudkan perlindungan terhadap ABH.

Hakikat anak, konsep dan tujuan perlindungan anak yang merupakan dasar program ini turut dijelaskan untuk mengingatkan kembali bahwa semua pihak bisa berperan untuk melakukan perlindungan anak. Pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu metode penanganan ABH dibahas dengan menyebutkan bahwa berbagai lembaga yang terlibat harus melakukan penanganan dengan sistematis, komprehensif, berkesinambungan, terpadu, serta melibatkan pihak-pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terlibat. Restoratif justice dipandang sebagai cara untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

21

Akses terhadap penyedia konseling, layanan kesehatan fisik/mental dan layanan lainnya, menjadi pembahasan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap ABH terlaksana secara tepat. Adapun disebutkan bahwa kantor DP3AKB di masing-masing kabupaten di Indonesia menyediakan akses gratis terhadap konseling profesional bagi ABH.

Banyak pelajaran yang diperoleh ABH sebelum adanya program PEDULI. Diantaranya ABH yang mengalami ketidakadilan perlakuan hukum, pelanggaran hak-hak dasar, mendapat diskriminasi, minim pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, petugas yang tidak ramah anak, paradigma sebagai napi, hingga stigma sebagai eks-napi.

Melalui program PEDULI diharapkan setiap ABH dapat mengakses layanan psikososial, terpenuhinya hak-hak dasar, komunikasi yang baik, hingga dukungan bagi ABH melalui kebijakan dan anggaran pemerintah. Hasil nyata dari program PEDULI saat ini yaitu meningkatnya komitmen stakeholder yang peduli terhadap ABH, adanya kebijakan program dan anggaran dari Pemda melalui OPD terkait (tentative), LPKA menjadi lebih ramah anak dan lebih terbuka dengan program pembinaan dari luar hingga adanya akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan dan administrasi kependudukan.

Terlepas masih ada berbagai masalah, itu terkait dengan kendala yang dihadapi. Seperti sikap petugas, orang tua, dan lingkungan sekitar anak menjadi kendala utama. Setelah dilakukan penguatan sektor kepemimpinan, advokasi SK kepala daerah menjadi PERDA terkait penanganan anak, advokasi anggaran ke DPRD, hingga ditingkatkannya kapasitas petugas, orang tua dan publikasi media, pelan-pelan berbagai masalah mulai teratasi.

Terakhir, dibahas peran remaja yang dianggap penting untuk ikut meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan terhadap anak, melaksanakan kegiatan yang memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan anak, sampai membangun lingkungan yang ramah terhadap anak.

KOLASE Kolaborasi Aksi Remaja Sehat

PKBI Daerah tergabung dalam Aliansi Satu Visi (ASV) sebagai jaringan organisasi masyarakat sipil yang telah berdiri 10 tahun dan memiliki anggota yang bekerja di 10 provinsi di Indonesia.

Jaringan ini telah menginisiasi program Get Up Speak Out (GUSO) untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Program ini telah berlangsung selama 5 tahun sejak 2016 di Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Denpasar dan Kupang. Dari kelima wilayah tersebut, PKBI Daerah mengambil peran strategis di 4 wilayah maupun di tingkat nasional dalam proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi hingga bertanggung jawab terhadap program GUSO.

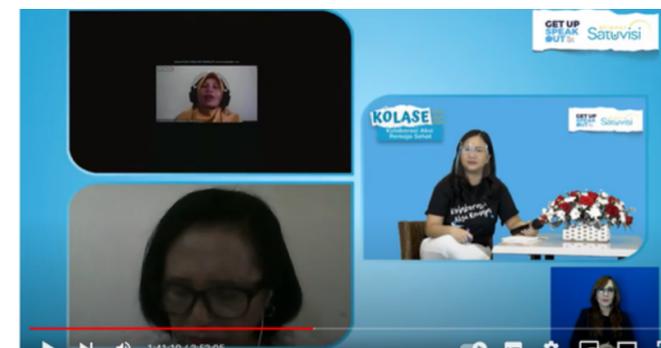
Program GUSO di wilayah Bandar Lampung dilaksanakan oleh PKBI Daerah Lampung, wilayah Jakarta dilaksanakan oleh PKBI DKI Jakarta, termasuk beberapa kecamatan dengan PMI Kota Jakarta Timur dan Yayasan Pelita Ilmu, di wilayah Semarang dilaksanakan oleh PKBI Daerah Jawa Tengah, di wilayah Denpasar dilaksanakan oleh PKBI Daerah Bali.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, jaringan Aliansi Satu Visi menyelenggarakan perayaan puncak lima tahun perjalanan program GUSO yang bertajuk “KOLASE : Kolaborasi Aksi Remaja Sehat” pada 28 Oktober 2020 pukul 09.00-12.00 WIB di Youtube Channel Aliansi Satu Visi.

Acara ini menampilkan video perjalanan dan capaian Program GUSO, talkshow bersama pemangku kebijakan, serta penampilan champion remaja dari berbagai daerah. Kolaborasi Aksi Remaja Sehat ini juga menjadi ajang bagi remaja yang berasal dari beragam daerah dan menjadi aktor kunci dalam program untuk mengekspresikan karyanya dengan mengkampanyekan “Remaja Berdaya Berani Bersuara”, “Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Komprehensif Bukan Tabu Tapi Perlu”, dan “Semua Berhak Akses Layanan Kesehatan Ramah Remaja”. Melalui Challenge KOLASE, lebih dari 100 karya video Tik Tok, Poster dan Photovoice, diposting di media sosial oleh remaja di seluruh Indonesia.

Acara ini mengundang Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bersama menyaksikan perubahan yang dihasilkan oleh program GUSO terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja. Harapannya, program serupa dapat dilanjutkan oleh Pemerintah di tingkat Daerah maupun Nasional.

Momentum KOLASE (Kolaborasi Aksi Remaja Sehat) menjadi salah satu milestone penting bagi remaja yang menjadi aktor kunci dalam program GUSO untuk meningkatkan kolaborasi dan semangat meneruskan gerakan yang telah dibangun. PKBI Daerah yang menjadi bagian dari program juga berhasil membentuk legacy yang penting untuk dirawat dan dikembangkan kebermanfaatannya bagi remaja di seluruh Indonesia.



22

Alamat PKBI Daerah

PKBI ACEH

Jl. T. Nyak Arif No. 229, Lamgugop, Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 7551235
Fax. (0651) 7551259
pkbiaceh.nad@gmail.com
pkbiaceh@pkbi.or.id
Instagram @pkbiaceh

PKBI SUMATERA UTARA

Jl. Multatuli No. 34 Medan 20151
Telp. (061) 4514595
Fax. (061) 4147202
pkbi_su@yahoo.co.id
pkbilampung@pkbi.or.id
Instagram @pkbi_su

PKBI SUMATERA BARAT

Jl. Sultan Syahrir No. 50 Seberang Padang, Padang
Telp. (0751) 39630
Fax. (0751) 39630
pkbi_sumbar@yahoo.com
pkbisumbar@pkbi.or.id
Instagram @pkbisumbar

PKBI JAMBI

Jl. Darah Jingga No. 49 Rt. 05 Kel. Rajawali, Jambi
Telp. (0741) 7554579
Fax. (0741) 7554579
pkbi_jambi@yahoo.co.id
pkbijambi@pkbi.or.id
Instagram @pkbijambi

PKBI BENGKULU

Jl. Kapuas Raya No. 15 Bengkulu 38001
Telp. (0736) 25260
Fax. (0736) 625084
pkbi.bengkulu@gmail.com
pkbibengkulu@pkbi.or.id
Instagram @pkbibengkulu

PKBI LAMPUNG

Jl. Abdi Negara I, Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung 35214
Telp. (0721) 487483
Fax. (0721) 483704
pkbi_lpg1@yahoo.co.id
pkbilampung@pkbi.or.id
Instagram @pkbilampung

PKBI SUMATERA SELATAN

Jl. Kol. H. Burlian/Mahkamah Militer Km 6, Palembang
Telp. (0711) 420786
Fax. (0711) 420786
pkbisumsel@yahoo.com
pkbisumsel@pkbi.or.id
Instagram @pkbi_sumsel

PKBI KEPULAUAN RIAU

Jln. Raja Haji Fisabilillah, Komplek Ruko No. 56i, Batu 5 atas Kel. Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
Telp. (0771) 315208
pkbi.kepri@gmail.com
pkbikepri@pkbi.or.id
Instagram @pkbikepri

PKBI RIAU

Jl. Adisucipto No. 283 Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau
Telp. 0823 - 90256600
pkbi_riau@yahoo.co.id
pkbiriau@pkbi.or.id
Instagram @pkbiriau

PKBI DKI JAKARTA

Jl. Taman Malaka Selatan RT 10/RW 06, Kelurahan Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. (021)8520371
Fax. (021) 85909885
pkbidki@yahoo.co.id
pkbidki@pkbi.or.id
Instagram @pkbidkijakarta

PKBI JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 496 Bandung 40226
Telp. (022) 7567997
Fax. (022) 7514332
pkbi.jabar@gmail.com
pkbijabar@pkbi.or.id
Instagram @pkbijabar

PKBI JAWA TENGAH

Jl. Jembawan No. 8 Semarang Barat 50145
Telp. (024) 7603503
Fax. (024) 7601989
pkbi.jateng@gmail.com
pkbijateng@pkbi.or.id
Instagram @pkbijawatengah

PKBI YOGYAKARTA

Jl. Tamansiswa gang basuki MG II/558 Surokarsan, Mergangsan Yogyakarta 55151
Telp. (0274) 419709
office@pkbi-diy.info
pkbidiy@pkbi.or.id
Instagram @pkbidiy

PKBI JAWA TIMUR

Jl. Indra Giri No. 24 Surabaya 60341
Telp. (031) 5676694
Fax. (031) 5664901
pkbijatim@yahoo.com
pkbijatim@pkbi.or.id
Instagram @pkbijawatimur

PKBI BALI

Jl. Gatot Subroto IV/6 Denpasar 60341
Telp. (0361) 430214
Fax. (0361) 430214
pkbibali@yahoo.com
pkbibali@pkbi.or.id
Instagram @pkbi_bali

PKBI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Basuki Rachmat No. 2, Kupang 85117
Telp. (0536) 822270
Fax. (0380) 828888
ippa_ntt@yahoo.com
pkbintt@pkbi.or.id
Instagram @pkbintt

PKBI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Majapahit 11 A (Depan Kantor BPKP NTB), Mataram 83125
Telp. (0370) 626426
Fax. (0370) 643727
pkbi_ntb05@yahoo.com
pkbintb@pkbi.or.id
Instagram @pkbi.ntb

Alamat PKBI Daerah

PKBI KALIMANTAN BARAT

Jl. Letjen Sutoyo No. 17A Pontianak 78121
Telp. (0561) 743446
Fax. (0561) 748384
pkbikalbar@pkbi.or.id
Instagram @pkbikalbar

PKBI KALIMANTAN SELATAN

Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 24A Banjarmasin 70125
Telp. (0511) 302853
Fax. (0511) 302853
pkbi.kalsel@gmail.com
pkbikalsel@pkbi.or.id
Instagram @pkbi_kalsel

PKBI KALIMANTAN TIMUR

Kompleks Voorfo Segiri Jl. Letjen Soeprapto No. 1, Samarinda 75123
Telp. (0541) 734751
pkbikaltim@pkbi.or.id
Instagram @pkbikaltim

PKBI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Putri Junjung Buih I No. 2 Palangkaraya 73113
Telp. (0536) 38290
Fax. (0536) 38290
pkbi.kalteng@gmail.com
pkbikalteng@pkbi.or.id
Instagram @pkbikalteng

PKBI SULAWESI UTARA

Jl. Achmad Yani No. 14, Lorong Gereja Pantekosta, Sario Tumpaan, Manado 95114
Telp. (0431) 862481
Fax. (0431) 877030
pkbiaceh.nad@gmail.com
pkbi.sulut@gmail.com
pkbisulut@pkbi.or.id
Instagram @pkbisulut

PKBI SULAWESI SELATAN

Jl. Anur Djema No. 55 Kel. Mamajang Dalam, Kota Makassar 90135
Telp. (0411) 871051
Fax. (0411) 877106
pkbi_ss@yahoo.com
pkbisulsel@pkbi.or.id
Instagram @pkbisulawesiselatan

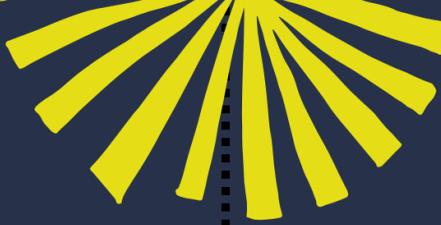
PKBI SULAWESI TENGAH

Jl. Prue Bongo Lr. Lekatu No. 7, Palu
Telp. (0451) 452178
Fax. (0451) 452178
pkbisulteng@pkbi.or.id
Instagram @pkbisulteng

PKBI PAPUA

Jl. Angsa Utara D3 No. 184 Furia Kotaraja Jayapura 99225 Papua
Telp. (0967) 582415
Fax. (0967) 586291
pkbipapua@yahoo.co.id
pkbipapua@pkbi.or.id
Instagram @pkbipapua

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT

Ketua Pengurus Nasional : DR. Ichsan Malik, M.Si
Wakil Ketua Pengurus Nasional I : Agus Santoso, SH, LLM
Wakil Ketua Pengurus Nasional II : DR. dr. Tb. Rahmat Santika, SpA.MARS
Wakil Ketua Pengurus Nasional III : Ramadhani Taraeq Kemal Pasha
Wakil Ketua Pengurus Nasional IV : Dra. Retno Dewanti Purba, MPsiT, Psikolog
Wakil Ketua Pengurus Nasional V : Dr. Ary Soeharjanto, M.Si
Sekretaris : Dra. Josephine Rosa Marietta, M.Psi
Wakila Sekretaris : Fransiska Agatha W
Bendahara : Lanny Layadi
Wakil Bendahara I : Erlin Ryandani
Wakil Bendahara II : Intansari Abdams Katoppo

Direktur Eksekutif : Eko Maryadi
Wakil Direktur Eksekutif : Heri Susanto
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan : Erry H. Kamka
Kepala Bidang Program dan Advokasi : Yudi Supriadi
Kepala Bidang Kelembagaan : Haryati
Kepala Bidang Keuangan : Milawati Rahayu

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Branch Jakarta Pusat
Branch licence No. 561/KM.1/2019
Wisma Bumiputera, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Setiabudi
Jakarta 12910
P. 62-21-5224 581 F. 62-21-5224 582
E. nexiasudirman@kanaka.co.id
www.kanaka.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ref: 00312/3.0409/AU.1/11/1150/1/VI/2021

Kepada Yth,
Pengurus Nasional
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To:
The National Board
Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA)

We have audited the accompanying financial statements of Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2020, as well as a statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.



NEXIA KPS - Kanaka Puradiredja, Suhartono is a member firm of the "Nexia International" network. ©2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. For more information visit www.nexia.com

Jakarta Pusat | Jakarta Barat | Jakarta Selatan | Medan | Surabaya | Semarang

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan No. 00209/2.1000/AU.1/11/1264-2/1/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) as of December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The financial statements of Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) as of December 31, 2019 audited by other independent auditor with unmodified opinion No. 00209/2.1000/AU.1/11/1264-2/1/X/2020 dated October 7, 2020.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Barugamuri Dachi, M. Ak., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 1150
Licence of Public Accountant No. AP. 1150

Jakarta, 30 Juni 2021/ June 30, 2021



**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

**INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2020**
(Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

	Translasi ke Dolar Amerika Serikat/Translated into United States Dollar													
	2020			2019			2020			2019				
	Dengan		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions	Dengan		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions	Dengan		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions	Dengan		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions		
	dari pemberi sumber daya / With restrictions	pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions		dari pemberi sumber daya / With restrictions	pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions		dari pemberi sumber daya / With restrictions	pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions		dari pemberi sumber daya / With restrictions	pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions			
Catatan / Notes	from resource provider	from resource provider	Jumlah / Total	from resource provider	from resource provider	Jumlah / Total	from resource provider	from resource provider	Jumlah / Total	from resource provider	from resource provider	Jumlah / Total		
ASET													ASSETS	
Aset lancar													Current assets	
Kas dan setara kas	4, 24	44.983.214.282	3.424.497.497	48.407.711.779	11.908.406.447	12.147.060.006	24.055.466.453	3.189.168	242.786	3.431.954	856.658	873.826	1.730.484	Cash and cash equivalents
Investasi lain-lain	5, 24	99.434.165	-	99.434.165	356.875.589	-	356.875.589	7.050	-	7.050	25.673	-	25.673	Other investments
Piutang lain-lain	6, 23, 25	2.522.322.981	-	2.522.322.981	1.805.181.686	1.293.533.925	3.098.715.611	178.825	-	178.825	129.860	93.053	222.913	Other receivables
Perediaan	7	220.780.838	-	220.780.838	197.365.802	-	197.365.802	15.653	-	15.653	14.398	-	14.398	Inventories
Uang muka dan beban dibayar dimuka	8	487.901.229	2.306.496.863	2.794.398.092	167.833.607	1.644.551.137	1.812.384.744	34.591	163.523	198.114	12.073	118.305	130.378	Advances and prepaid expenses
Jumlah aset lancar		48.313.653.495	5.730.994.360	54.044.647.855	14.435.663.131	15.085.145.068	29.528.808.199	3.425.287	406.309	3.831.596	1.038.462	1.085.184	2.123.646	Total current assets
Aset tidak lancar													Non-current Assets	
Aset tetap - nilai buku	9	11.528.569.781	-	11.528.569.781	15.636.814.290	-	15.636.814.290	817.339	-	817.339	1.124.870	-	1.124.870	Fixed Assets - book value
Uang muka investasi	10	891.616.863	-	891.616.863	861.616.863	-	861.616.863	63.213	-	63.213	61.982	-	61.982	Advance in investment
Jumlah aset tidak lancar		12.420.186.644	-	12.420.186.644	16.498.431.153	-	16.498.431.153	880.552	-	880.552	1.186.852	-	1.186.852	Total non-current assets
Jumlah Aset		60.733.840.139	5.730.994.360	66.464.834.499	30.934.094.284	15.085.145.068	46.019.239.352	4.305.839	406.309	4.712.148	2.225.314	1.085.184	3.310.498	Total Assets

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
 (Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

Translasi ke Dolar Amerika Serikat/Translated into United States Dollar													
		2020			2019			2020			2019		
		Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total
LIABILITAS													
Liabilitas Jangka Pendek													
Uang usaha	11, 24	193.339.771	481.354.533	674.694.304	929.155.880	122.568.626	1.051.724.506	13.707	34.127	47.834	66.841	8.817	75.658
Biaya yang masih harus dibayar	12	285.096.985	342.665.499	627.762.484	43.962.348	970.141.944	1.014.104.292	20.212	24.294	44.506	3.163	69.789	72.952
Uang pajak	16a	891.162.238	-	891.162.238	-	-	-	63.181	-	63.181	-	-	-
Pendapatan ditangguhkan	13	2.688.932.468	19.693.286.336	22.382.218.804	100.819.982	12.532.406.311	12.633.226.293	190.637	1.396.192	1.586.829	7.253	901.547	908.800
Dana titipan	14, 24	226.668.667	15.000.000	241.668.667	94.580.624	20.446.569	115.027.193	16.070	1.063	17.133	6.806	1.471	8.277
Uang lain-lain	15, 24	1.969.168.455	-	1.969.168.455	781.640.000	1.439.581.618	2.221.221.618	139.608	-	139.608	56.229	103.560	159.789
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6.254.368.584	20.532.306.368	26.786.674.952	1.950.158.834	15.085.145.068	17.035.303.902	443.415	1.455.676	1.899.091	140.292	1.085.184	1.225.476
Liabilitas Jangka Panjang													
Pembayaran konsumen		-	-	-	76.083.000	-	76.083.000	-	-	-	5.473	-	5.473
Liabilitas imbalan pesakit	17	1.720.590.799	-	1.720.590.799	2.411.939.126	-	2.411.939.126	121.984	-	121.984	173.508	-	173.508
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.720.590.799	-	1.720.590.799	2.488.022.126	-	2.488.022.126	121.984	-	121.984	178.981	-	178.981
Jumlah Liabilitas		7.974.959.383	20.532.306.368	28.507.265.751	4.438.180.960	15.085.145.068	19.523.326.028	565.399	1.455.676	2.021.075	319.273	1.085.184	1.404.457
ASET NETO													
Aset Neto	18	44.763.812.342	(6.668.325.384)	38.095.486.958	26.495.913.324	-	26.495.913.324	3.173.613	(472.763)	2.700.850	1.906.041	-	1.906.041
Komponen ekuitas lainnya	17	(137.918.210)	-	(137.918.210)	-	-	-	(9.778)	-	(9.778)	-	-	-
Jumlah Aset Neto		44.625.894.132	(6.668.325.384)	37.957.568.748	26.495.913.324	-	26.495.913.324	3.163.835	(472.763)	2.691.072	1.906.041	-	1.906.041
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		52.600.853.515	13.863.980.984	66.464.834.499	30.934.094.284	15.085.145.068	46.019.239.352	3.729.234	982.913	4.712.148	2.225.314	1.085.184	3.310.498

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENT OF COMPREHENSION INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
 (Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

Translasi ke Dolar Amerika Serikat/Translated into United States Dollar													
		2020			2019			2020			2019		
		Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resource provider		Jumlah/ Total
PENDAPATAN													
Pendapatan Donor													
Hibah kas dari IPPF	19	4.025.660.280	425.346.185	4.451.006.465	4.110.602.676	7.951.737.029	12.062.339.705	285.407	30.156	315.563	295.706	572.026	867.732
Donatur lainnya	20	1.856.341.896	60.592.873.325	62.449.215.221	65.057.794	78.800.637.432	78.865.695.226	131.609	4.295.844	4.427.453	4.680	5.668.703	5.673.383
Pemerintah lokal	21	6.392.317	1.289.965.792	1.296.358.109	40.941.269	1.474.456.706	1.515.397.975	453	91.455	91.908	2.945	106.069	109.014
Jumlah Pendapatan Donor		5.888.394.493	62.368.185.302	68.196.579.795	4.216.601.739	88.226.831.167	92.443.432.906	417.469	4.417.455	4.834.924	303.331	6.346.798	6.650.129
Pendapatan lain-lain													
Klinik		3.528.325.111	-	3.528.325.111	8.415.355.044	-	8.415.355.044	250.147	-	250.147	605.378	-	605.378
Program untuk peningkatan dana		9.766.719.269	61.012.500	9.827.731.769	14.518.560.894	20.037.513	14.538.598.407	692.429	4.325	696.754	1.044.426	1.441	1,045,867
Bunga		163.102.393	28.781.289	191.883.682	189.498.720	360.547	189.859.267	11.563	2.041	13,604	13,632	26	13,658
Lain-lain		33.586.766.148	-	33.586.766.148	2.082.034.240	-	2,082,034,240	2,381,196	-	2,381,196	149,774	-	149,774
Total Pendapatan lain-lain		47.044.912.921	89.793.789	47.134.706.710	25.285.448.898	20.398.060	25.225.846.958	3,335,335	6,366	3,341,701	1,813,210	1,467	1,814,677
JUMLAH PENDAPATAN		52.933.307.414	62.397.979.091	115.331.286.505	29.422.050.637	88.247.229.227	117.669.279.864	3,752,804	4,423,821	8,176,625	2,116,541	6,348,265	8,464,806

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENT OF COMPREHENSION INCOME (continued)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
 (Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

	Translasi ke Dolar Amerika Serikat/Translated into United States Dollar												
	2020			2019			2020			2019			
	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	
	Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		
	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	
Catatan/ Notes	from resource	from resource	from resources	from resource	from resource	from resources	from resource	from resources	from resource	from resources	from resource		
	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider		
BIAYA													
Biaya Proyek per Strategi													
Layanan Kesehatan Sekundal dan Reproduksi (Strategi 1)	22	-	19.251.002.289	19.251.002.289	-	10.983.313.938	10.983.313.938	-	1.364.835	1.364.835	-	790.110	790.110
Program Anak dan Remaja & Gerakan Kesehatan Nasional (Strategi 2)	22	14.226.071.362	5.827.188.996	20.053.260.358	6.854.418.262	31.808.630.123	38.663.048.385	1.008.584	413.129	1.421.713	493.088	2.288.226	2.781.314
Penganggulangan HIV & AIDS dan Kampanye Penghapusan Stigma dan Diskriminasi berbasis masyarakat (Strategi 3)	22	-	37.331.539.286	37.331.539.286	-	32.364.381.041	32.364.381.041	-	2.646.688	2.646.688	-	2.328.205	2.328.205
Advokasi Untuk Pemenuhan Hak-Hak Sekundal dan Reproduksi (Strategi 4)	22	-	6.450.010.096	6.450.010.096	-	8.347.743.304	8.347.743.304	-	457.285	457.285	-	600.514	600.514
Pengelolaan Pengetahuan dan Motivasi, Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Manajemen, Pusat Informasi, Edukasi, Konseling HKSR dan Mobilisasi Sumber Dana (Strategi 5)	22	-	206.563.808	206.563.808	-	4.743.160.821	4.743.160.821	-	14.646	14.646	-	341.210	341.210
Jumlah Biaya Proyek		14.226.071.362	69.066.304.475	83.292.375.837	6.854.418.262	88.247.229.227	95.101.647.489	1.008.584	4.896.583	5.905.167	493.088	6.348.265	6.841.353

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENT OF COMPREHENSION INCOME (continued)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
 (Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

	Translasi ke Dolar Amerika Serikat/Translated into United States Dollar												
	2020			2019			2020			2019			
	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	Dengan		Jumlah/	
	Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		Tanpa pembatasan	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya /		
	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	Without restrictions	With restrictions	from resources	from resource	
Catatan/ Notes	from resource	from resource	from resources	from resource	from resource	from resources	from resource	from resources	from resource	from resources	from resource		
	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider	provider		
BIAYA (lanjutan)													
Strategi pendukung	22	3.915.883.630	-	3.915.883.630	4.110.602.676	-	4.110.602.676	277.624	-	277.624	295.706	-	295.706
Proyek pendukung	22	1.237.390.829	-	1.237.390.829	303.895.400	-	303.895.400	87.727	-	87.727	21.861	-	21.861
Administrasi dan jasa umum	22	15.286.062.574	-	15.286.062.574	17.198.007.123	-	17.198.007.123	1.083.734	-	1.083.734	1.237.178	-	1.237.178
JUMLAH BIAYA		34.665.408.395	69.066.304.475	103.731.712.870	28.466.923.461	88.247.229.227	116.714.152.687	2.457.649	4.896.583	7.354.252	2.847.833	6.348.265	8.396.098
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		18.267.899.019	(6.668.325.384)	11.599.573.635	955.127.176	-	955.127.176	1.295.135	(472.762)	822.373	68.708	-	68.708
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	16b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		18.267.899.019	(6.668.325.384)	11.599.573.635	955.127.176	-	955.127.176	1.295.135	(472.762)	822.373	68.708	-	68.708
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:													
Kerugian aktuaris	17	(137.918.210)	-	(137.918.210)	-	-	-	(9.778)	-	(9.778)	-	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF		18.129.980.809	(6.668.325.384)	11.461.655.425	955.127.176	-	955.127.176	1.285.357	(472.762)	812.595	68.708	-	68.708
ASET NETO AWAL TAHUN	18	26.495.913.323	-	26.495.913.323	25.540.786.147	-	25.540.786.147	1.878.477	-	1.878.477	1.763.745	-	1.763.745
SELISIH KURS PENJABARAN MATA UANG ASING		-	-	-	-	-	-	27.565	-	27.565	73.588	-	73.588
ASET NETO AKHIR TAHUN		44.625.894.132	(6.668.325.384)	37.957.568.748	26.495.913.323	-	26.495.913.323	3.191.399	(472.762)	2.718.637	1.906.041	-	1.906.041

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENT OF NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

	Catatan/ Notes	Translasi ke Dolar Amerika Serikat/ Translated into United States Dollar						
		Aset neto / assets neto			Aset neto / assets neto			
		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions from resources provider	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resources provider	Jumlah aset neto / Total net assets	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya / Without restrictions from resources provider	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya / With restrictions from resources provider	Jumlah aset neto / Total net assets	
Saldo per 1 Januari 2019	18	25.540.786.147	-	25.540.786.147	1.837.332	-	1.837.332	Balance as of January 1, 2019
Kenaikan tahun berjalan	18	955.127.176	-	955.127.176	68.709	-	68.709	The Increase of net assets
Saldo per 31 Desember 2019	18	26.495.913.323	-	26.495.913.323	1.906.041	-	1.906.041	Balance as of December 31, 2019
Kenaikan tahun berjalan	18	18.267.899.019	(6.668.325.384)	11.599.573.635	1.295.135	(472.763)	822.372	The Increase of net assets
Kerugian aktuarial	16	(137.918.210)	-	(137.918.210)	(9.778)	-	(9.778)	Actuarial loss
Saldo per 31 Desember 2020	18	44.625.894.132	(6.668.325.384)	37.957.568.748	3.191.399	(472.763)	2.718.637	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

- 6 -

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dolar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENT OF CASH FLOWS
AS OF 31 DECEMBER 2020
(Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

	Catatan / Notes	Translasi ke Dolar Amerika Serikat/				
		2020	2019	2020	2019	
ARUS KAS DARI OPERASI						CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Aset neto		11.461.655.425	955.127.176	812.595	68.709	Net assets
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto - menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:						Adjustment to reconcile changes in net assets into cash provided by operating activities:
Penyusutan aset tetap	9	1.457.900.271	945.634.669	103.360	68.026	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan pascakerja	17	(691.348.327)	-	(49.014)	-	Post-employment benefits liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas :						Changes in assets and liabilities :
Piutang lain – lain		576.392.630	1.182.351.821	40.864	85.055	Other receivables
Persediaan		(23.415.036)	40.065.569	(1.660)	2.882	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		(982.013.348)	4.973.150.142	(69.622)	357.755	Advances and prepaid expenses
Uang muka investasi		(30.000.000)	-	(2.127)	-	Advances investment
Utang usaha		(377.030.202)	(439.997.428)	(26.730)	(31.652)	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar		(386.341.809)	613.147.932	(27.390)	44.108	Accrued payables
Utang pajak		891.162.238	(1.839.338)	63.181	(132)	Taxes payables
Pendapatan ditangguhkan		9.748.992.511	(14.514.927.278)	691.173	(1.044.164)	Unearned revenue
Data titipan		126.641.474	(4.775.346.379)	8.978	(343.525)	Fund deposits
Utang lain – lain		(252.053.163)	193.397.938	(17.870)	13.913	Other payables
Investasi lain – lain		257.441.694	988.285.280	18.252	71.095	Other investment
Pembiayaan konsumen		(76.083.000)	(41.759.926)	(5.394)	(3.006)	Consumer financing
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		21.701.901.358	(9.882.709.822)	1.538.596	(710.936)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOW INVESTING ACTIVITIES
Pelepasan aset tetap	9	2.650.343.968	-	187.901	-	Disposal of fixed assets
Perolehan aset tetap	9	-	(282.158.751)	-	(20.298)	Acquisition of fixed assets
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		2.650.343.968	(282.158.751)	187.901	(20.298)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOW FINANCING ACTIVITIES
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		24.352.245.326	(10.164.868.573)	1.726.497	(731.234)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
SELISIH KURS PENJABARAN MATA UANG ASING					98.598	EXCHANGE RATE DIFFERENCE IN FOREIGN CURRENCY TRANSLATION
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4, 24	24.055.466.453	34.220.335.026	1.705.457	2.363.120	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4, 24	48.407.711.779	24.055.466.453	3.431.954	1.730.484	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

- 7 -